

PERANAN BIMAS DAN INMAS DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

(The role of BIMAS and INMAS in Increasing the economy)

A.T. Birowo.

Dalam bulan April 1976, Institut Pertanian Bogor (IPB) mengumpulkan sekitar 60 orang ahli pertanian dan teknologi yang mewakili tokoh-tokoh bidang penelitian, lembaga pendidikan tinggi, instansi-instansi Pemerintah serta swasta, dalam sebuah simposium yang membahas masalah "Pemilihan dan Penggunaan Teknologi Dalam Pembangunan Pertanian". Sebuah kertas kerja utama, disiapkan oleh 6 orang tokoh ahli IPB, ITB dan UGM. Dalam kertas kerja utama itu (Laporan Simposium halaman 44), para ahli tersebut merisaukan masalah perberasan kita dengan kalimat :

"... Dalam pada itu, kegemasan sering pula mencekam hati dan perasaan kita, mengingat betapa tiap kabinet sejak Proklamasi senantiasa mencantumkan swasembada pangan sebagai programnya, tetapi belum juga kunjung nampak hasilnya, padahal tanah yang subur, air, cahaya matahari dan tenaga manusia tersedia lebih dari cukup".

Kecuali itu, dalam kata Pendahuluan Laporan (Laporan Simposium halaman 3), disebutkan "Dengan kata lain, Bimas secara mikro berhasil, tetapi secara makro (menuju swasembada pangan) belum mencapai apa yang diharapkan".

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai program Bimas dan Inmas, dalam karangan ini akan diungkapkan pengaruh Bimas dan Inmas terhadap perekonomian masyarakat, berdasarkan angka-angka statistik yang tersedia dalam laporan-laporan Biro Pusat Statistik serta instansi-instansi Pemerintah yang lain. Dengan penyajian angka-angka itu diharapkan dapat dihayati neraca manfaat dan biaya program Bimas dan Inmas yang telah dialami oleh masyarakat Indonesia selama tahun 1971 - 1977.

Lingkup program Bimas dan Inmas

Kalau pada tahun 1971 program Bimas dan Inmas padi meliputi 2,1 juta hektar atau 25% dari seluruh areal padi, maka tahun 1977,

telah meningkat menjadi 5,3 juta hektar atau 63% dari luas areal padi. Sejak tahun 1974, jagung, ubi-kayu dan kedelai, dimasukkan juga dalam program Bimas dan Inmas, hingga untuk tahun 1977 luas areal Bimas dan Inmas palawija ini meliputi 799 ribu hektar jagung, 139 ribu hektar ubi-kayu dan 241 ribu hektar-kedelai.

Untuk Bimas padi, dalam periode 1971 - 1977 rata-rata per tahun tercatat areal sekitar 2,3 juta hektar yang diusahakan oleh 2,7 juta petani dengan usahatani masing-masing rata-rata sebesar 0,85 hektar. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, ini sama dengan seluruh jumlah petani di Malaysia. Memang untuk Indonesia, menurut Sensus Pertanian 1973, ini baru merupakan 18% dari seluruh jumlah petani di Tanah Air kita. Kalau dibandingkan dengan luas rata-rata usahatani pertanian rakyat sebesar 0,98 hektar (menurut Sensus Pertanian 1973) maka petani Bimas lebih kecil usahatannya. Ini berarti bahwa program Bimas dan Inmas makin diarahkan kepada sasaran petani yang luas usahanya di bawah rata-rata nasional.

Peningkatan produktivitas

Seperti tampak dalam tabel- 1, selama kurun waktu 1970 - 1977, rata-rata hasil per hektar sawah intensifikasi, yaitu yang ikut program Bimas dan Inmas, adalah 43,16 kwintal padi kering giling. Dibandingkan dengan sawah non-intensifikasi, yaitu yang tidak ikut dalam program Bimas dan Inmas, hasil per hektar sawah intensifikasi ini rata-rata selama tahun 1970 - 1977 adalah sekitar 60% lebih tinggi.

Tabel-1 : Produktivitas Bimas dan Inmas

Tahun	Hasil padi kering giling dalam kwintal/HA		
	intensifikasi	non intensifikasi	rata-rata keseluruhan
1970	41,23	27,54	31,06
1971	39,45	27,78	31,70
1972	43,48	24,47	32,10
1973	45,56	22,91	33,43
1974	43,68	27,41	34,53
1975	42,68	27,34	34,37
1976	45,77	29,29	36,40
1977	43,46	29,52	36,56
Rata-rata 1970-1977	43,16 (159,7%)	27,03 (100,0%)	33,77

Sumber : Departemen Pertanian

Tampak dalam tabel-1, tiap tahun produktivitas sawah secara nasional dalam kwintal padi kering giling per hektar meningkat dari 31,06 tahun 1970 menjadi 36,56 tahun 1977. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh makin meluasnya areal Bimas dan Inmas.

Peningkatan pendapatan petani

Data dari Survei Pertanian Januari - April 1976 oleh BPS, seperti disajikan dalam tabel-2, menunjukkan bahwa rata-rata di Indonesia, sawah intensifikasi padi menghasilkan pendapatan Rp. 141.771,- per hektar, yang merupakan 12% di atas pendapatan petani padi dari sawah non-intensifikasi.

Untuk petani-petani dari propinsi - propinsi kelompok A, yang menghasilkan sekitar 80% dari produksi beras di Indonesia, pendapatan per hektar ini adalah lebih tinggi, yaitu Rp. 160.104,-. Dan ini merupakan pendapatan yang 19% lebih tinggi dari petani sawah non-intensifikasi. Pendapatan yang lebih tinggi ini disebabkan terutama oleh produktivitas sawah intensifikasi yang lebih unggul dari sawah non-intensifikasi.

Tabel-2 : Perbandingan Pendapatan Usahatani per Hektar intensifikasi dan non-intensifikasi.

Wilayah	Pendapatan usahatani per hektar	
	Intensifikasi	Non-intensifikasi
a		
1. Propinsi-propinsi A		
a. Rupiah	160.104	134.091
b. Prosen	119,4	100,0
b		
2. Propinsi-propinsi B		
a. Rupiah	144.127	125.506
b. Prosen	114,8	100,0
3. INDONESIA		
a. Rupiah	141.771	126.371
b. Prosen	112,2	100,0

Sumber : Survei Pertanian Januari - April 1976, BPS

- a Sumut, Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Kalsel, Sulsel dan Bali.
- b Propinsi-propinsi lainnya di Indonesia kecuali Maluku, Irija dan Timtim.

Peningkatan kesempatan kerja

Kalau data dari Survei Pertanian 1976 itu dikaji lebih lanjut, maka seperti disajikan dalam tabel-3, rata-rata nasional, petani intensifikasi membayar tenaga kerja 70% lebih banyak dari pada petani non-intensifikasi. Untuk petani di propinsi-propinsi kelompok A dan B, angka kelebihan itu adalah 24% dan 84%.

Tabel - 3 ; Pengeluaran untuk tenaga kerja per HA bagi petani padi intensifikasi dan non-intensifikasi.

Wilayah	Pengeluaran untuk tenaga kerja per HA	
	Intensifikasi	Non-intensifikasi
1. Propinsi-propinsi A ^a		
a. Rupiah	19.410	24.097
b. Prosen	100,0	124,1
2. Propinsi-propinsi B ^b		
a. Rupiah	11,977	22.120
b. Prosen	100,0	184,4
3. INDONESIA		
a. Rupiah	16.263	27.684
b. Prosen	100.0	170.2

Sumber : Survei Pertanian 1976, BPS

- a Sumut, Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Kalsel, Sulsel dan Bali
- b Propinsi-propinsi lainnya di Indonesia kecuali Maluku, Irija dan Timtim

Pengeluaran biaya usahatani untuk tenaga kerja ini mencerminkan kebutuhan tenaga kerja bagi usahatani. Karena angka - angka untuk kedua tipe sawah, yaitu intensifikasi dan non-intensifikasi, diambilkan dari wilayah yang sama di mana tingkat upah buruh tani tentunya juga sama untuk pekerjaan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa petani intensifikasi memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak dari pada petani non-intensifikasi. Angka sebesar 70% ini cukup mengesankan sebagai peningkatan kesempatan kerja di pedesaan.

Kecuali kesempatan kerja tambahan yang diadakan oleh petani-petani intensifikasi itu, masih ada lagi kesempatan kerja lain yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan penunjang program Bimas dan Inmas, seperti misalnya perdagangan dan pengangkutan pupuk dan pestisida.

Selama tahun 1970 - 77, rata-rata per tahun tersalur pupuk sekitar 785.010 ton atau sekitar 210 ton untuk setiap Wilayah Unit Desa. Dari tahun 1970—1971 terjadi peningkatan jumlah PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dari 1854 menjadi 6829. BRI Unit Desa dari 545 menjadi 3059 serta BUUD/KUD dari 104 menjadi 3966. Hal-hal ini tentu membawa peningkatan kesempatan kerja yang tidak sedikit artinya bagi ekonomi pedesaan.

Peningkatan kegiatan ekonomi pedesaan

Seperti tampak dalam tabel 4, dari musim tanam 1970/71 sampai dengan musim tanam 1977/78 telah disalurkan kredit Bimas di pedesaan sebesar sekitar Rp. 323 milyar. Secara rata-rata, untuk tiap BRI-Unit Desa pertahun dalam kurun waktu 1970-77 itu, jumlahnya adalah sekitar Rp. 1,8 djuta. Untuk daerah pedesaan yang dicakup dalam sebuah BRI-Unit Desa, dana sebesar Rp. 1,8| juta per tahun ini, merupakan katalisator yang amat berarti bagi kehidupan ekonomi pedesaan. Apalagi bila diingat bahwa dana sebesar itu, tujuannya utama adalah untuk kegiatan produksi dan bukan untuk konsumsi semata-mata. Belum lagi pengembangan ekonomi pedesaan yang ditimbulkan oleh masuknya pupuk dan pestisida seperti diuraikan di muka.

Tabel-4: Perkreditan Bimas dari MT 1970/71 s/d MT 1977/78

Uraian	Rp. juta
1. Jumlah kredit yang tersalur secara keseluruhan	323.866,0
2. Jumlah kredit yang tersalur rata-rata per tahun di seluruh Indonesia	40.480,0
3. Jumlah kredit yang tersalur rata-rata per BRI - Unit Desa per tahun	1,8

Sumber BRI.

Imbangan manfaat dan biaya

Manfaat langsung yang dapat diukur dari program Bimas dan Inmas adalah tambahan produksi beras. Tambahan produksi per hektar ialah hasil per hektar sawah intensifikasi di kurangi dengan hasil per hektar sawah non-intensifikasi. Tambahan produksi per hektar ini dikalikan dengan luas areal intensifikasi, memberikan tambahan produksi masyarakat

secara keseluruhan sebagai akibat dari penyelenggaraan program Bimas dan Inmas. Bila tambahan produksi ini dikalikan dengan harga ditingkat desa, maka terdapatlah manfaat program dalam bentuk tambahan pendapatan masyarakat. Angka-angka ini disajikan dalam tabel-5.

Tabel 5 Manfaat Program Bimas dan Inmas 1971 - 77

Tahun	Manfaat langsung berupa tambahan produksi a padi	
	JUTA TON	Rp. milyar ^b
1971	2,4	56,3
1972	2,7	122,9
1973	5,0	323,1
1974	7,3	245,5
1975	5,0	290,2
1976	5,2	343,0
1977	4,9	350,8

a Dalam bentuk gabah kering lumbung

b Berdasar rata-rata harga gabah ditingkat desa

Tampak dalam tabel-5 itu bahwa atas dasar harga-harga yang berlaku, manfaat program telah meningkat dari Rp. 56,3 milyar tahun 1971 menjadi Rp. 350,8 milyar untuk tahun 1977. Dalam kalkulasi ini, untuk tidak mendorong optimisme yang berlebihan, tidak terhitung manfaat yang dihasilkan oleh peningkatan lapangan usaha karena perdagangan pupuk dan pestisida serta makin luasnya kredit.

Untuk pelaksanaan program Bimas dan Inmas padi dan palawija, masyarakat Indonesia telah mengeluarkan biaya yang meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Anggaran Pembangunan Pemerintah (APBN) untuk Proyek Bimas dan Inmas padi dan palawija yang meliputi semua pengeluaran proyek mulai dari biaya penyuluhan, biaya kebun percobaan benih, atau peminjaman sampai pada gaji dan honor para petugas dan pejabat pelbagai instansi Pusat dan Daerah yang ikut serta dalam kegiatan Bimas dan Inmas padi dan palawija.

2. Biaya kredit yang meliputi antara lain subsidi bunga BRI untuk pelaksanaan kredit BIMAS, penggantian kredit karena kegagalan panen serta biaya administrasi pelaksanaan kredit Bimas.
3. Subsidi pupuk dan pertisida yang dimanfaatkan oleh petani peserta Bimas dan Inmas.
4. Biaya-biaya lain seperti anggaran proyek Satuan Udara Pertanian dan subsidi administrasi Wilayah Unit Desa.

Jumlah dari ke-4 macam pengeluaran itu merupakan tambahan investasi tahunan masyarakat Indonesia guna memperoleh tambahan produksi melalui Program Bimas dan Inmas di atas pengeluaran setiap tahunnya yang telah dikeluarkan oleh tiap petani Indonesia dalam kegiatannya disawah ladangnya. Jumlah biaya program Bimas dan Inmas yang meliputi ke-4 kategori pengeluaran itu disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Biaya program Bimas dan Inmas setiap tahun 1971 - 77

Tahun	Biaya dalam milyar rupiah
1971	17,6
1972	15,8
1973	32,6
1974	75,7
1975	90,0
1976	198,2
1977	143,4

Sumber : Dep. Pertanian, Dep. Keuangan dan BRI

Dalam tabel 6 itu terlihat bahwa biaya program intensifikasi meningkat dari Rp. 17,6 milyar tahun 1971 menjadi Rp. 143,4 milyar tahun 1977

Dalam tabel 7, disajikan berdampingan angka-angka manfaat dan biaya, hingga bisa dilihat perimbangannya. Untuk tahun 1977, misalnya, dapat disimpulkan, bahwa untuk tiap Rp. 1 biaya yang dikeluarkan masyarakat manfaat yang diperoleh kembali adalah Rp. 2,5.

Dari angka-angka itu nampak bahwa imbalan manfaat dan biaya itu kecuali tahun 1976, semuanya adalah di atas 2,5. Dari segi evaluasi program secara ekonomi, program Bimas dan Inmas dapat dianggap menguntungkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.



Penghematan devisa

Apabila biaya program itu dibagi dengan jumlah tambahan produksi maka akan diperoleh biaya program atau biaya produksi per ton

Tabel 7 Imbangan manfaat dan biaya

Tahun	Manfaat Biaya (Rp. milyar)		Manfaat per Unit biaya
1971	56,3	17,6	3,2
1972	122,9	15,8	7,7
1973	323,1	32,6	9,9
1974	245,5	75,7	3,2
1975	290,2	90,0	3,2
1976	343,0	198,2	1,7
1977	350,8	143,4	2,5

padi atau beras. Harga ini bisa dinyatakan dalam rupiah atau dollar dan dibandingkan dengan harga rata-rata beras impor. Kalau tidak ada program Bimas dan Inmas beras tambahan produksi itu harus diimpor. Dengan demikian tambahan produksi beras dikalikan dengan selisih antara harga impor dan biaya produksi dapat dianggap merupakan penghematan devisa yang telah dilaksanakan oleh program Bimas dan Inmas. Angka-angka ini disajikan dalam tabel 8, di mana penghematan itu meningkat dari US \$ 237,4 juta tahun 1971 menjadi US \$ 374,9 juta tahun 1977 atau rata-rata sebesar US \$ 625,4 per tahun.

Tabel 8. Penghematan devisa 1971 - 1977

Tahun	Harga beras impor rata- rata CIF US \$/ton;	Biaya pro- gram US \$/ ton beras	Penghematan devisa US \$ per ton beras	Penghematan devisa keseluruh- an US \$ juta
1971	160	20	140	237,4
1972	170	10	160	500,3
1973	150	20	130	596,2
1974	210	60	150	471,8
1975	330	70	260	847,6
1976	470	150	320	989,4
1977	350	110	240	734,9
Rata-rata per tahun				625,4

Kesimpulan

Program Bimas dan Inmas ternyata telah meningkatkan perekonomian masyarakat baik ditinjau dari aspek kesempatan kerja maupun pendapatan.

Masalah yang dihadapi dalam Pelita III adalah bahwa program Bimas dan Inmas itu harus diperluas dan dianekaragamkan agar cakupannya dapat menjangkau lebih banyak jenis komoditi serta petani kecil, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah dan belum menikmati program Bimas dan Inmas.